

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Kecil dan Menengah merupakan sektor usaha yang memiliki peran penting dan strategis dalam perkembangan ekonomi dunia. Sektor Usaha Kecil dan Menengah juga merupakan pilar perekonomian nasional yang memberikan kontribusi pada penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan dan sebagai wadah sosial ekonomi masyarakat. UKM merupakan kegiatan usaha yang banyak diminati setelah terjadinya krisis ekonomi yang berdampak pada PHK pada perusahaan-perusahaan besar (Sri Wahyuningsih,2018). Walaupun sudah diakui sebagai penopang kesejahteraan rakyat namun UKM belum berkembang sesuai yang diharapkan. Berbagai permasalahan terjadi pada UKM seperti keterbatasan permodalan, pemasaran serta kebijakan struktural.

Menurut Indriyatni (2013), menjelaskan bahwa besarnya modal bagi setiap usaha merupakan masalah yang sangat penting, modal yang terlalu besar dari apa yang dibutuhkan akan menambah beban pembiayaannya, terlebih lagi bila modal tersebut bukan modal sendiri. Akan tetapi modal yang terlalu sedikit (dari kebutuhannya) juga akan menyulitkan jalannya usaha yang akan dilakukan. Pada usaha mikro dan usaha kecil sering kali belum ada pemisahan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha, sehingga masalah besarnya modal ini bisa menghambat keberhasilan dan pertumbuhan UKM.

Menurut Leiwakabessy & Lahallo (2018), banyak pelaku usaha yang mengeluhkan tentang perkembangan usahanya karena disebabkan kekurangan modal dalam bentuk uang. Begitu juga banyak kegiatan usaha mikro mengalami kegagalan atau bangkrut dikarenakan tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. Pemahaman terhadap manajemen keuangan tidak hanya sekedar bagaimana cara mengelola uang kas, namun juga pada bagaimana cara mengelola keuangan untuk menghasilkan keuntungan. Meskipun terlihat mudah dan sangat sederhana, setiap pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) penting untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang baik. Memanfaatkan peluang fasilitas kredit bank, bantuan koperasi, dan pihak ke 3 penyedia dana dalam membantu

mengembangkan UKM lebih meningkat serta memaksimalkan Kredit Usaha Kecil yang merupakan solusi dalam permasalahan pembiayaan UKM untuk lebih berkembang dan Maju.

Pada data berita Statistik BPS dan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (2017), Kondisi UMKM di Indonesia sekitar sekitar 99,99% (62.9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2017), sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5400 unit. Usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%), Usaha Kecil 5,7 juta (4,74%), dan Usaha Menengah 3,73 juta (3,11%); sementara Usaha Besar menyerap sekitar 3,58 juta jiwa. Artinya secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, sementara Usaha Besar hanya menyerap sekitar 3% dari total tenaga kerja nasional (sumber: Ukmindonesia.com). Data tersebut menunjukkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi salah satu elemen penting dalam pengembangan ekonomi.

Peneliti telah melakukan riset mengenai jumlah UKM yang memperoleh izin dan mendapat pinjaman bank di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Dari riset tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah UKM di Kecamatan Cipayung

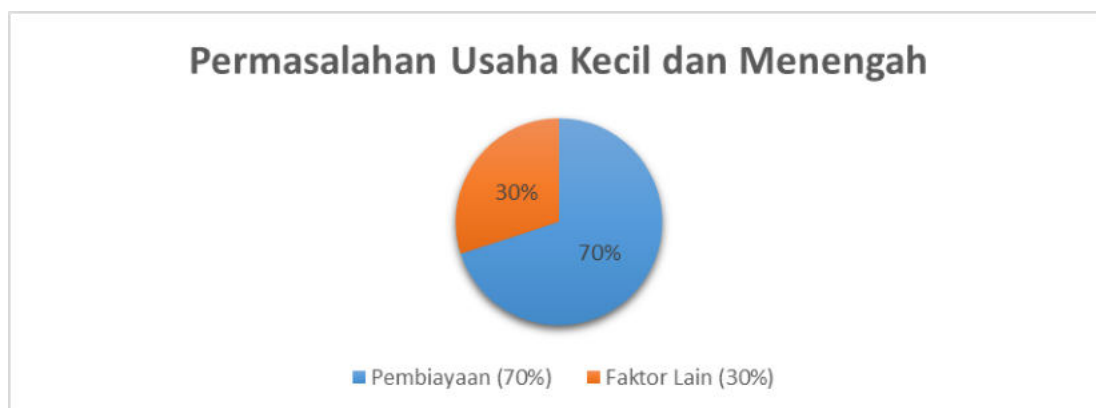
Tahun	Jumlah UMKM
2019	137

Sumber: Data Kecamatan Cipayung April 2020

Peneliti juga melakukan riset di Kantor Walikota Jakarta Timur. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan peneliti di Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Jakarta Timur, didapatkan hasil bahwa beberapa masalah yang terjadi pada pelaku UKM adalah kendala permodalan, UMKM harus lolos SLIK/BI Checking yaitu lolos dari kredit macet atau kelayakan calon debitur. Selanjutnya, permasalahan Perizinan, dikarenakan lokasi usaha yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai zona lokasi (zonasi). Zona tersebut adalah zona hijau yaitu lokasi usaha berada dekat kali, bantaran kali, sutet, dan tol. Lalu, Kemasan produk, produk UKM yang dibuat memiliki kemasan yang kurang menarik dari segi logo, merk, dan tagline , dan masalah yang terakhir mengenai pembukuan keuangan usaha dimana pelaku UKM belum memahami betul

mengenai pentingnya pembukuan dan kurangnya pengetahuan mengenai pembukuan yang terorganisi.

Secara garis besar masalah tersebut sama dengan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK), yang ditunjukkan melalui gambar berikut.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 1. Data Permasalahan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018

Diagram dalam gambar 1, sejalan dengan link www.finance.detik.com yang diakses pada tanggal 2 April 2020 terdapat berita yang menjelaskan bahwa permasalahan utama banyak dihadapi para pelaku UKM adalah masalah pembiayaan dalam mengembangkan usahanya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa sekitar 70% dari jumlah usaha kecil dan menengah kekurangan modal, sulitnya pendanaan ini dikarenakan banyak pelaku UKM yang tidak memenuhi syarat untuk kredit formal. Syarat tidak terpenuhi seperti tidak memiliki asset untuk jaminan, laporan keuangan atau kondisi keuangan yang tidak memadai dan kurangnya riwayat kredit. Selanjutnya faktor lain permasalahan UKM disebutkan pada link www.cnbIndonesia.com menurut presiden Joko Widodo permasalahan yang terjadi pada UKM ialah masalah inovasi, bagaimana membangun brand, desain yang mengikuti pasar, membuat kemasan agar menarik pembeli. Lalu masalah lainnya mengenai kebijakan pemerintah yang menyulitkan UKM. Menurut link www.kompas.com Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik dimaksudkan untuk menciptakan kesetaraan antara pelaku usaha perdagangan daring dan luring. Namun, sejumlah ketentuan dalam peraturan yang berlaku justru dianggap menyulitkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UKM serta berpotensi

menghambat perkembangan perdagangan secara elektronik atau e-dagang yang tengah tumbuh.

Cara mengatasi masalah pada UKM adalah dengan meningkatkan pengetahuan mengenai literasi keuangan. Menurut Aribawa (2016), diperlukan cara strategis guna meningkatkan kinerja dan keberlangsungan UKM. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperkaya pengetahuan pelaku UKM terhadap pengetahuan keuangan sehingga pengelolaan dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan dengan lebih baik. Menurut Penelitian oleh Nelima (2019), Sabila & Wijayangka (2019), Djuwita & Yusuf (2018), Owusu (2019) menjelaskan bahwa literasi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan usaha

Melakukan inovasi merupakan hal penting dalam melangsungkan pengembangan usaha. Penelitian terdahulu oleh Novitasari (2017), Tahseen & Sajilan (2016), Dewi (2013), Lestari (2015), menjelaskan bahwa inovasi dengan uji partial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan UKM.

Pengembangan UKM juga perlu mendapat perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang secara lebih kompetitif. Menurut Wuryandani dan Meilani (2013) kebijakan pemerintah perlu diupayakan agar lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM di samping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya. Penelitian oleh Yusnita dan Wibawa (2020), Putra (2015), Arwan, dkk (2018), Obaji & Olugu (2016) menjelaskan bahwa peran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan UKM.

Setelah memahami uraian diatas, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pengaruh dari peran literasi keuangan, inovasi, dan peran pemerintah terhadap pengembangan usaha khususnya pada UKM, maka judul yang diambil pada penelitian ini adalah **“Pengaruh Literasi Keuangan, Inovasi, dan Peran Pemerintah Terhadap Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah”**, dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pelaku Usaha Kecil

dan Menengah mengenai pentingnya pengembangan usaha yang dapat menyejahterakan ekonomi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah?
- b. Apakah inovasi berpengaruh terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah?
- c. Apakah peran pemerintah berpengaruh terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi pengaruh literasi keuangan terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah.
- b. Mengidentifikasi pengaruh inovasi terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah.
- c. Mengidentifikasi pengaruh peran pemerintah terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis

Untuk para akademis dan peneliti-peneliti selanjutnya dan pihak lainnya, penelitian ini diharapkan dapat lebih memperdalam pengetahuan mengenai pengaruh literasi keuangan, inovasi, dan peran pemerintah terhadap pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.

b. Kegunaan praktis

Sebagai bahan masukan bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah mengenai pentingnya pengembangan usaha yang dapat menyejahterakan ekonomi masyarakat dan para pelaku Usaha Kecil dan Menengah dapat menjalankan usaha dengan sebaik mungkin agar usaha yang mereka jalankan dapat berkembang.